

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OBJEK WISATA
RELIGI TAJUG GEDE CILODONG KABUPATEN
PURWAKARTA MENGGUNAKAN MODEL DONALD van METTER
DAN CARL van HORN**

Oleh :

Diena Pahlewi¹, Hanny Purnamasari S.Sos., M.AP², Gun Gun Gumilar SAP., M.AP³

Email: 1610631180046@student.unsika.ac.id

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2,3}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran dan Minuman Keras dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penataan Kawasan Bungursari Istimewa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gagasan dari Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta Periode 2008 – 2018 yang menetapkan perlunya mendirikan sebuah masjid megah di kawasan Prostitusi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menghilangkan prostitusi di Kabupaten Purwakarta khususnya di daerah Cilodong, Bungursari yang sudah ada sejak Tahun 1973. Dibangunnya Tajug Gede Cilodong menjadi magnet menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke Purwakarta karena konsep dari Tajug Gede Cilodong adalah memadukan aspek wisata religi, edukasi dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan dinilai dari Standar dan tujuan kebijakan yang masih belum optimal belum sepenuhnya kegiatan prostitusi hilang; Sumber Daya manusia ada yang mendominasi serta SDM finansial yang perlu disokong oleh sumber lain; Komunikasi antar organisasi yang dilakukan secara face to face dialogue baik dalam forum formal maupun non formal; Karakteristik agen pelaksana yang melanjutkan kepemimpinan selanjutnya; Kecenderungan pelaksana (implementor) yang sigap dan inovatif namun tetap diperlukan pengawasan berkala; Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berubah signifikan dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dan keseriusan pemma untuk memberantas kegiatan prostitusi di Kabupaten Purwakarta.

Kata Kunci : Implementasi, Prostitusi, Tajug Gede Cilodong, Dedi Mulyadi.

A. PENDAHULUAN

Reformasi otonomi daerah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya

otonomi daerah dimana pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya dengan pelbagai kebijakan daerah yang tentunya tidak bertentangan dengan undang undang. Salah satunya dengan kebijakan pemerintah daerah dalam aspek Pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau daerah mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat menambah pemasukan dari setiap objek wisata tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2008 – 2018 yang dipimpin oleh Bupati Dedi Mulyadi terus meningkatkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Purwakarta

termasuk kepariwisataan. Berdasarkan informasi dari pengelola informasi wisata di Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta (13/03/2020) Kunjungan pariwisata di Kabupaten Purwakarta selalu menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung baik dari wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan lokal/nusantara (wisnus) dengan destinasi wisata yang bertambah setiap tahunnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Purwakarta

Tahun	Objek	Wisman (Orang)	Wisnus (Orang)	Jumlah
2016	29	1.280	902.605	903.885
2017	32	1.897	2.031.828	2.033.725
2018	45	832	2.453.628	2.454.460
2019	62	725	2.653.030	2.653.755

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

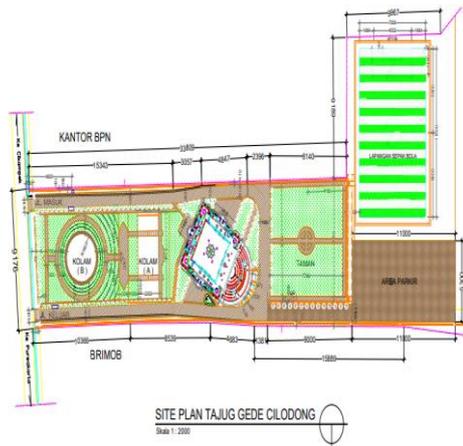
Berdasarkan penjabaran di atas, jumlah destinasi wisata dan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara/lokal yang berkunjung ke Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2016 – 2019 terus mengalami peningkatan dengan destinasi terakhir yang sudah di akumulasikan sebanyak 62 destinasi dengan total wisatawan di Tahun 2019 sebanyak 2.653.755 orang.

Kabupaten Purwakarta memiliki beragam potensi wisata yang dapat membangun citra Purwakarta Namun disisi lain Purwakarta memikul imej negatif yang sukar dihilangkan yaitu kawasan prostitusi Cilodong Kecamatan Bungusari yang sudah ada sejak Tahun 1973. Maka dari itu, untuk

menanggulangi penyakit sosial tersebut DPRD dan pemerintahan kabupaten Purwakarta membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum di daerah dalam menertibkan dan menindak perbuatan pelacuran serta pelanggaran terhadap larangan minuman keras (Farid,2018).

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 belum efektif dalam merespon permasalahan prostitusi di Kabupaten Purwakarta dimana dari tahun ke tahun tetap saja kegiatan prostitusi menggeliat khususnya di Cilodong

meskipun beragam upaya telah dilakukan. Maka munculah strategi atau inovasi Dedi Mulyadi dengan mendirikan bangunan masjid megah tepat di bekas lokasi prostitusi dengan nama “Tajug Gede Cilodong” yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Site Plant Tajug Gede Cilodong

Sumber : Arsip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Purwakarta

Kawasan Tajug Gede Cilodong mulai di bangun pada Tahun 2017 di atas lahan seluas 90.000 m² yang mana lahan tersebut terdaftar dalam surat keputusan kantor wilayah badan pertanahan nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 11 September 2003 Nomor 218-530.2-32-2003. (Arsip Badan Keuangan dan Aset Daerah).

Berdasarkan informasi dari staff Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (20/04/2020) untuk pembangunan Tajug Gede Cilodong dengan Alokasi anggaran untuk pembangunan awal Tajug Gede Cilodong sebesar Rp 38 miliar dengan bentuk fisik masjid dua lantai disertai ornamen pendukung seperti kolam ikan, air mancur, dan lain lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tajug Gede Cilodong memiliki konsep yang

mengkolaborasikan wisata religi dengan pendidikan dan ekonomi dimana di areal kawasan masjid dibangun spot spot edukasi bagi pengunjung dan ditanami pula beragam tanaman seperti jagung, labu, padi gogo dan lainnya guna menambah wawasan mengenai pertanian selain itu dari ornamen air mancur yang berada di depan bangunan masjid dari Tajug Gede Cilodong yang otomatis menjadi daya tarik tersendiri menjadi peluang perputaran ekonomi di sekitar Tajug Gede Cilodong bagi masyarakat setempat (Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta, 2020)

Masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Prostitusi di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yang sukar dihilangkan
2. Penegakan peraturan daerah nomor 13 Tahun 2007 yang dianggap belum efektif dalam mengatasi prostitusi di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
3. Dominasi Dedi Mulyadi dalam pembangunan Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta
4. Kurangnya transparansi anggaran dalam pembangunan Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta

Peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan suatu kawasan masjid sebagai upaya menanggulangi prostitusi di Kabupaten Purwakarta khususnya Cilodong yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terkait dalam pembangunan Tajug Gede Cilodong dengan menggunakan model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn yang didasarkan pada enam buah variabel seperti 1). Standar dan sasaran kebijakan, 2). Sumber daya, 3).

Karakteristik organisasi pelaksana, 4). Sikap para pelaksana, 5). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Pembangunan Objek Wisata Religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn.

B. KAJIAN PUSTAKA

James E. Anderson (dalam Leo Agustino, 2017) mengemukakan "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors indealing with a problem or matter of concern*". (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan). Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penterjemahan peraturan kedalam bentuk tindakan sehingga dalam praktiknya implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sangat kompleks dan bermuatan politis karena ada pengaruh dari berbagai kepentingan (Agustino dalam Wahyu, Karjuni, 2019).

Van meter dan Van Horn dalam Winarno (2002) membatasi implemen-tasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya. Van meter dan Van Horn

membagi ada enam variabel antara lain sebagai berikut :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan

Tujuan kebijakan Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kegiatan dengan menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Pada proses implementasi kebijakan, sumber daya ini merupakan hal penting dalam menentukan hasil dari adanya kebijakan yang ada, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tergantung pada sumber daya yang ada yakni sumber daya finansial atau anggaran dan juga sumber daya manusianya. Jawaban yang sering kita dengar dari para implementor mengatakan bahwa terbatasnya dana untuk membiayai program program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar minimnya dana akan menjadi factor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Dalam proses implementasi kebijakan perlu mendapatkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. komunikasi dan koordinasi yang baik dari sebuah organisasi maka program – program yang dibuat dapat terealisasi dengan tujuan serta sasaran yang tepat. Implementasi akan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan.

4. Karakteristik badan pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan proses bagaimana agen yang terlibat dapat menjalankan kebijakan yang telah ada sesuai dengan ketentuan meliputi organisasi formal maupun non formal. Hal ini dapat berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat. Hal tersebut penting karena akan mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan dengan ciri yang tepat dan sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh agenpelaksana kebijakan tersebut (Wahyu, Karjuni 2019)

5. Kecenderungan pelaksana

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan

kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan,netralitas,penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Sikap para pelaksana dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan tersebut memerlukan peran serta masyarakat sebagai penyalur aspirasi. Karena jika para pelaksana tidak mengetahui kebutuhan maupun keinginan publik atau masyarakat maka kebijakan yang dibuat tidak akan mungkin berjalan dengan apa yang diharapkan masyarakat.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk melihat progress dari implementasi kebijakan adalah sudah sejauh mana lingkungan sekelilingnya dapat mendorong keberhasilan kebijakan tersebut. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak baik dapat menyebabkan sumber masalah dan menjadikan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta maupun fenomena-fenomena yang dijumpai di lapangan pada saat penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Pembangunan Objek Wisata Religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta dengan menggali

informasi dari responden penelitian/informan yang terdiri dari :

- a. Bidang Kesra Kecamatan Bungursari
- b. Pengurus/DKM Tajug Gede Cilodong
- c. *Special Project Manager* PT. East West Seed Indonesia
- d. Staff Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
- e. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
- f. Staff Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Purwakarta
- g. Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Masyarakat

Analisis menggunakan model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Sugiono, 2013).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta dengan Menggunakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn menitik beratkan pada enam buah variabel yaitu, standar; tujuan; dan sasaran

kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pengaruh keenam variabel dalam model Donald Van Metter dan Carl Van Horn terhadap implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta.

1. Standar, tujuan, dan sasaran kebijakan

Pembangunan Tajug Gede Cildoong di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dibangun di atas lahan bekas prostitusi dimana pembangunannya dimulai sejak tahun 2017 dan pada Tahun 2019 Tajug Gede Cilodong dibuka untuk umum dan menjadi destinasi wisata yang memadukan konsep religi, edukasi dan ekonomi. Implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk mewujudkan Penataan Kawasan Bungursari Istimewa yang berisi 9 poin dimana salah satunya adalah bebas pelacuran/prostitusi yang berpedoman pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2007 mengenai larangan Pelacuran dan Minuman Keras. Namun pada kenyataannya kegiatan tersebut masih ada meskipun jumlah pemilik warlin telah berkurang dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Daftar Pemilik Warung Lilin

NO	NAMA PEMILIK	JUMLAH PELAYAN	NAMA PELAYAN	ALAMAT	ALAMAT ASAL	UMUR	RET
1	RUSNADI	2 Orang	1. NANI 2. MARYATI	Desa Wanakerta RT 002/001	CIANJUR	21	25
2	DEWI	2 Orang	1. IRE 2. ANEL 3. IVA	Desa Wanakerta RT 002/001	JAKARTA JAKARTA CIAMPEDE	23 25 20	
3	SITI BOKAYAH	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	Mundur Purwakarta RT 0103	41	
4	DIENGGIH	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	Desa Wanakerta RT 002/001	55	
5	HERMAN	2 Orang	1. MIRA 2. KELUR	Desa Wanakerta RT 002/001	CIANJUR CIANJUR	35 38	
6	ATIK	-	-	-	SUKAMANDI KAB. SUBANG	43	
7	INAH	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	Desa Wanakerta RT 002/001	45	
8	UWAS	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	PASALARAN KAB. SUBANG	40	
9	DIAN	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	BANDUNG	28	
10	MAYA	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	PURWAKARTA	21	
11	LUMI	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	KP. Cilodong Purwakarta	45	
12	YANTI	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	KAB. SUBANG	29	
13	SITI	1 Orang	1. SINTA	Desa Wanakerta RT 002/001	PASALARAN BANDUNG	40	
14	RISAH	-	-	Desa Wanakerta RT 002/001	Desa Wanakerta RT 002/001	34	
15	DI DAMI	1 Orang	1. AMI	Kp. Cilodong RT 1807 Desa Cilodong	BOGOR	38	
16	-	1 Orang	1. EVA	Kp. Cilodong RT 1807 Desa Cilodong	CITERO PLEPED	28	
17	DEWI	8 Orang	1. ENJUR 2. SARAH 3. YAYAH 4. ANITA 5. LINDA 6. SYAH 7. DANI 8. RATNA	Kp. Cilodong RT 1807 Desa Cilodong	CIBONDAS BESR PASALARAN CIAMPEDE CIAMPEDE CIBANDUNG CIBANDUNG CIAMIS	35 31 42 35 25 25 24	
18	DEBI	2 Orang	1. IHA 2. IKA	Kp. Cilodong RT 1807 Desa Cilodong	KURUSSAN INDRAMAYU	43 28	
19	DENI	2 Orang	1. ENOK 2. NURYATI 3. HENRI 4. IRENA 5. IRENI 6. IREY 7. HENI	Kp. Kawasatem RT 0101 Desa Wanakerta	CILIDONG KALIJATI SUBANG CIBANDUNG PASALARAN INDRAMAYU BANDUNG		
20	DIFFIDI	2 Orang	1. IRIDI 2. ISA W	Kp. Cilodong RT 1807 Desa Cilodong	BOGOR	30 29	
21	NABABAN	1 Orang	1. TINA	Kp. Cilodong RT 1807 Desa Cilodong	INDRAMAYU	31	

Sumber : Arsip Kecamatan Bungursari, 2019

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 25 warung lilin sesuai dengan data Tahun 2015 dan pada Tahun 2019. Dan ketika Tajug Gede Cilodong sudah di buka untuk umum pada Tahun 2019 mengalami pengurangan warung lilin dan tersisa 12 warung lilin yang masih menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengawasinya.

Sasaran yang dituju adalah Wanita Tuna Susila / Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kawasan Cilodong, Bungursari dan masyarakat Purwakarta secara keseluruhan adalah terwujudnya lingkungan yang bersih dari kegiatan prostitusi dengan tidak adanya warung warung lilin (warlin) di sepanjang jalan Cilodong dan diganti dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang kuliner, tanaman ataupun para pedagang kaki lima di sekitar Tajug Gede Cilodong sehingga terciptanya perputaran ekonomi di sekitar Tajug Gede Cilodong.

2. Sumber – sumber kebijakan

Implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede

Cilodong Kabupaten Purwakarta dipengaruhi oleh sumber daya manusia, finansial dan waktu. Sumber daya manusia sudah dapat dikategorikan sebagai sumber daya yang berkualitas dan mendukung dalam implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta dikelola oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk ide-ide desain pembangunan yang memiliki filosofis budaya dan edukasi dibuat oleh Dedi Mulyadi yang kemudian diserahkan kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Purwakarta untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan anggaran dan bekerjasama dengan PT. East West Seed Indonesia yang berperan dalam pendampingan perencanaan project Giri Harja yang merupakan bagian dari spot edukasi yang ada pada Kawasan Tajug Gede Cilodong.

Tidak hanya sumber daya manusia yang dilihat dari jumlah dan kemampuan personil. Sarana dan prasarana serta besaran biaya juga telah dialokasikan dalam membangun sebuah masjid besar yang diperindah dengan Taman Welas Asih seluas 1.800 meter dan luas masjidnya sendiri 5.200 meter bernama Tajug Gede Cilodong dengan anggaran pembangunan awal sebesar Rp 38 Miliar (Staff Tata Bangunan Distarkim Purwakarta ,2020).

Alokasi anggaran untuk pembangunan lanjutan sebesar Rp. 8.045.493.960 di Tahun 2017 dan Rp 1.407.651.200 di Tahun 2018 . Dan pada Tahun 2019 mengajukan alokasi anggaran untuk penataan Air Mancur Welas Asih sebesar Rp 4.128.620.000 (Arsip Badan Keuangan dan Aset Daerah).

Sumber daya finansial, meskipun terbilang besar anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan tersebut masih dirasa belum optimal, anggaran yang kurang transparansi dan perlu bantuan dari pusat ataupun pihak swasta untuk membantu mengembangkan Tajug Gede Cilodong.

Sarana prasarana Tajug Gede Cilodong terdiri dari ruangan ketua DKM, ruang ibadah, ruang kebersihan, ruang muadzin, ruang panel, aula, gudang, dan toilet sebanyak 22 pintu serta dilengkapi dengan Wi-Fi publik, mesin ATM beras yang dapat digunakan ketika panen padi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat dan uniknya juga terdapat tempat penggendongan bayi yang terbuat dari bambu sehingga pengunjung dapat beribadah dengan khusyuk. Kemudian untuk di luar bangunan masjid terdiri dari beragam spot spot seperti air mancur di Taman Welas Asih, saung, labirin payung, kebun bunga matahari, lapangan sepak bola, lahan penanaman padi dan jagung,

parkir yang luas dan spot yang sedang direncanakan adalah Museum Cinta Habibie – Ainun yang termasuk dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Taman Giri Harja namun yang perlu diperhatikan kembali adalah penerangan yang dirasa kurang oleh peneliti karena ketika atraksi air mancur di Taman Welas Asih Tajug Gede pengunjung lebih banyak dari biasanya dan penerangan tidak sepadan dengan banyaknya pengunjung.

3. Karakteristik Organisasi pelaksana

Berdasarkan hasil observasi wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta sudah didukung oleh karakteristik organisasi pelaksana yang tidak banyak mengalami perubahan dimana di kepemimpinan bupati Anne Ratna masih melanjutkan visi misi menjadi Purwakarta istimewa sebagaimana visi misi bupati sebelumnya Dedi Mulyadi dan untuk saat ini sedang dalam tahap pembangunan lanjutan di kawasan Tajug Gede Cilodong.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terdiri atas Dinas Tata Ruang dan Pemukiman untuk merancang bagian fisik bangunan beserta rincian anggaran yang dibutuhkan, Dinas Pangan dan Pertanian untuk mengelola lahan pertanian di area masjid yang dibantu dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pihak swasta yakni PT. East West Seed Indonesia serta Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta untuk mempromosikan destinasi wisata religi di Kabupaten Purwakarta. Selain Pemerintah daerah dan swasta serta yang tidak luput dari perhatian yakni aktor utama dalam pembangunan Tajug Gede Cilodong adalah

Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta Periode 2008 – 2018 yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang berupaya menghilangkan imej negatif suatu kawasan menjadi pusat keagamaan islam.

4. Komunikasi antar organisasi

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan Suatu kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif, apabila apa yang menjadi standar tujuan dapat dipahami oleh para implementor (individu organisasi pelaksana). Standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten (Aan,2017).

Komunikasi antar organisasi berjalan lancar karena komunikasi yang dilakukan ketika membahas mengenai Tajug Gede Cilodong tidak selalu harus berada dalam ruang rapat melainkan di kala situasi santai juga dapat dilakukan baru setelah itu, dirapatkan atau dibahas lebih lanjut dengan instansi pemerintah terkait dan dalam kegiatan tertentu pihak pengelola kerap memfasilitasi pertemuan antar perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tajug Gede Cilodong yang tentunya dihadiri juga oleh perwakilan masyarakat baik dalam sebuah forum formal maupun saat event – event di Tajug Gede Cilodong.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik (Agustinus, 2006). Sikap para pelaksana (Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan Pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengelola/DKM Tajug Gede Cilodong)

dalam implemntasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong sangat mendukung. Organisasi pelaksana melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi kebijakan melalui kegiatan perencanaan pembangunan awal dengan melakukan survei lapangan (cek kondisi lahan/tanah), memberikan kontribusi berupa tenaga, material, alat berat dan pendanaan selama proses pembangunan Tajug Gede Cilodong karena ada juga dana yang didapat dari kontribusi OPD Purwakarta (Sekretaris II Tajug Gede Cilodong/DKM). Kemudian juga rutin melakukan pemeliharaan di Kawasan Tajug Gede untuk memonitoring apa ada bagian dari Tajug Gede yang mengalami kerusakan dan tidak luput juga mengecek bagian luar Tajug Gede seperti taman dan kondisi air mancur yang ada di Kawasan Masjid Tajug Gede Cilodong yang dicek secara berkala oleh Dinas Pangan dan Petanian dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta. Selain itu, ada Satpol PP yang terus berpatroli setiap hari dengan team team yang sudah dijadwalkan untuk bertugas di sepanjang kawasan Bungursari dan ada yang *standby* menjaga trantibum di Tajug Gede Cilodong untuk berusaha menjaga stabilitas kawasan tersebut.

Pembangunan Tajug Gede Cilodong ini sangat diperlukan adanya dukungan dari masyarakat yang mana masyarakat mau menerima perubahan ini. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat sangat mendukung hadirnya masjid tersebut, tidak ada penolakan dari masyarakat setempat karena baik masyarakat maupun pemerintah sama sama satu pemahaman dalam menanggulangi prostitusi.

Implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn diawali penyaringan persepsi dari para

pelaksana . Melalui tahap penyaringan persepsi ini diketahui ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan, diantaranya adalah 1) Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, 2) Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan 3) Intensitas terhadap kebijakan yang dilakukan (Wahyu, 2019).

Dari hasil penelitian yang dilakukan organisasi pelaksana memiliki pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang sangat baik hal ini karena para agen pelaksana sepenuhnya telah menyadari standar dan tujuan dari kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta karena agen pelaksana yang terlibat adalah orang-orang yang berkompeten pada bidangnya sehingga yang dikerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Maka dari itu, untuk pelaksana (operasional) di Tajug Gede Cilodong Bupati Purwakarta menunjuk orang-orang yang berkompeten dalam bidang atau profesinya dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 451.1.05/kep.742.kesra/2018 tentang Kepengurusan Pengelola Tajug Gede Cilodong.

Arah respon (disposisi) dari organisasi pelaksana merupakan hal yang “Crucial”. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta saat ini masih dalam tahap pembangunan lanjutan Tajug Gede Cilodong hal ini menunjukkan bahwa para organisasi pelaksana menerima setiap kebijakan yang dilakukan sehingga intensitas terhadap kebijakan meningkat. Setiap organisasi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan implementasi kebijakan

yang telah diputuskan dan mengikuti arahan arahan yang diberikan oleh Dedi Mulyadi selaku Ketua DKM Tajug Gede Cilodong yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Kondisi lingkungan sosial di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta terkait implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta adalah sangat mendukung, masyarakat berperan aktif dalam terlaksananya implementasi kebijakan ini dimana ketika ada kegiatan penanaman padi dan benih tanaman lainnya dari PT. East West Seed Indonesia masyarakat sekitar khususnya yang berprofesi petani ikut berkontribusi dibawah arahan Dinas Pangan dan Pertanian , selain itu menurut hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Bungursari mengatakan bahwa dengan hadirnya Tajug Gede Cilodong menyadarkan kembali pentingnya kesadaran masyarakat setempat untuk pro aktif apabila ditemukannya kegiatan prostitusi. Masyarakat memahami pentingnya pembangunan masjid tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai bidang seperti peningkatan dalam aspek religi, edukasi dan ekonomi sesuai dengan konsep dari Tajug Gede Cilodong yang memadukan ketiga aspek tersebut.

Dalam bidang politik adanya implementasi pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kondisi sosial, ekonomi dan politik di kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dan merupakan sebuah penegasan dari Pemerintah daerah dalam

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras yang didukung dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penataan Bungursari Istimewa.

Kebijakan untuk pembangunan Tajug Gede Cilodong membuat roda perputaran ekonomi di Bungursari, Purwakarta berputar, ramainya pengunjung menambah pemasukan masyarakat setempat dan UMKM (kuliner dan kios tanaman) semakin ramai oleh pembeli dan akan semakin meningkat ketika Giri Harja di Tajug Gede Cilodong sudah selesai dibangun karena akan semakin beragam spot – spot yang ada di Tajug Gede dan di dalamnya selain ada beberapa museum juga terdapat gerai pertanian nantinya akan ada jual beli produk olahan pertanian, *food station* dll.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Dimensi standar, tujuan, dan sasaran kebijakan bahwa standar implementasi dari pembangunan Tajug Gede Cilodong ini dengan menjadikan destinasi wisata baru di Kabupaten Purwakarta yang memadukan konsep religi, edukasi dan ekonomi. Dari Hasil penelitian ditemukannya perbedaan yang signifikan dimana ada pengurangan kegiatan prostitusi di sekitar area Tajug Gede Cilodong sehinggamasih menjadi Pekerjaan rumah untuk pemerintah menangani sisanya.
2. Dimensi sumber – sumber kebijakan bahwa pada sumber daya manusia adanya dominasi kepemimpinan dari Dedi Mulyadi kemudian pada alokasi anggaran cukup besar sehingga perlu bantuan dari pusat maupun pihak swasta dan untuk sarana prasarana terbilang cukup memadai hanya saja perlu adanya penambahan fasilitas penerangan.
3. Dimensi karakteristik organ pelaksana tidak mengalami perubahan karena visi misi Bupati Purwakarta terpilih dengan periode sebelumnya dalam kepariwisataan hanya melanjutkan yang sudah ada dan satu tujuan bersama,
4. Dimensi komunikasi antar organisasi dari hasil penelitian bahwa adanya interaksi komunikasi secara formal dan non formal yang dilakukan dalam *face to face dialogue*.
5. Dimensi Disposisi / sikap para pelaksana ditemukan bahwa Implementor sudah inisiatif mengerjakan apa yang menjadi tupoksinya hanya saja perlu dilakukan evaluasi secara berkala perihal kinerjanya jangan hanya dikendalikan oleh satu pihak saja.
6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik bahwa kebijakan pembangunan Tajug Gede Cilodong sangat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam hal trantibum tidak menjamurnya lagi kegiatan prostitusi dan adanya peluang usaha baru untuk mendapatkan pemasukan dari hadirnya Tajug Gede Cilodong yang memadukan religi, edukasi dan ekonomi (agrowisata).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Afabeta
- Winarno, Budi (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Skripsi/Jurnal

- Wahyu dan Karjuni (2019). Implementasi Kebijakan Pemba-ngunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Meter Van Horn., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Negeri Padang
- Widiastuti, Aan (2017). Implementasi Kebijakan Program Desa Maslahat Di Kabupaten Pasuruan (Studi Desa Kalirejo Kecamatan Bangil)., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Muhammadiyah Malang

Dokumen Resmi

- Arsip data pemilik warung lilin Kecamatan Bungurasri Tahun 2015.
- Arsip Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta : *Site Plan* Masjid Tajug Gede Cilodong.
- Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 451.1.05/kep. 742.kesra/2018 tentang Kepengurusan Pengelola Tajug Gede Cilodong.
- Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 tentang Penataan Kawasan Bungursari Istimewa
- Undang – Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Internet

- Farid Assifa (2018). Purwakarta Kini Punya Ikon Baru Tajug Gede Cilodong. Artikel ini telah tayang di Kompas.com diakses pada 20 September 2019 https://regional.kompas.com/read/2018/12/19/20342021/purwakarta-kini-punya-ikonbarutajug-gedecilodong?_page=all